



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AJI AGUSTIANA
2. Jabatan : PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
3. NHK : 243748

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 165.000.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 142.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU X M/T Deluxe Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 97.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 404.000.000

III. HUTANG Rp. 12.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 392.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDA NURAINI
2. Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
3. NHK : 755740

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.050.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.050.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASUDI ARTHA
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 266293

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 417.689.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/18 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 70.220.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 93.249.000
4. Tanah Seluas 1.225 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 12.250.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 138.400.000
6. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 73.570.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 212.500.000

1. MOTOR, HONDA PCX SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
2. MOBIL, HONDA HRV MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 575.804.416**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.225.993.416



III. HUTANG

Rp. 175.524.734

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.050.468.682

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SURYA ADI PRAJA
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 243770

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/36 m2 di KOTA SAMARINDA
, WARISAN Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KOTA SAMARINDA
, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 444.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
435.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 274.103

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.044.274.103

III. HUTANG Rp. 341.568.160

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 702.705.943

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BELLY
2. Jabatan : PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 625766

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.349.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/60 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/45 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 182.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/36 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KOTA SAMARINDA , LAINNYA Rp. 85.000.000
5. Tanah Seluas 150 m2 di KOTA SAMARINDA , LAINNYA Rp. 86.000.000
6. Tanah Seluas 150 m2 di KOTA SAMARINDA , LAINNYA Rp. 86.000.000
7. Tanah Seluas 150 m2 di KOTA SAMARINDA , LAINNYA Rp. 85.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/36 m2 di KOTA SAMARINDA , WARISAN Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 81.500.000

1. MOTOR, KAWASAKI NINJA SS/ SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, SUZUKI AZF414F / MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOTOR, HONDA Y1G02N02L0 AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.000.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	46.600.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.507.100.000
III. HUTANG	Rp.	523.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	984.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.